

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik pada saat ini, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara yaitu pengelolaan aset pada sektor publik. Pengelolaan barang milik negara berpengaruh terhadap nasib suatu instansi/lembaga pemerintah yang memiliki sumber daya yang memadai serta mampu dalam pengembangan pada cara pengelolaan barang milik negara.

Aset pemerintah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa nyaman tinggal tersebut terkait dengan kelengkapan dan prasarana publik, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya¹. Pengelolaan aset harus ditangani dengan

¹ Veronika Mulalinda, Steven J. Tangkuman, *Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten*

baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.²

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada dibawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.

Sitaro, Vol.2(Manado:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan AkuntansiUniversitas Sam Ratulangi Manado, 2014), p. Hal. 521-531

²*ibid.*

Dalam rangka pengamanan barang milik Negara dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik negara. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan Negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik negara yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik negara tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database barang milik negara yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada lembaga Negara.

Penatausahaan dalam bentuk pengkodean barang sebagai bagian dari pengelolaan barang milik Negara, haruslah dikoordinir secara profesional, sehingga nantinya akan menghasilkan data yang tepat dan akurat. Berdasarkan audit BPK RI, untuk tercapainya Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan dan salah satu pengecualiannya adalah pengelolaan aset tetap. Selain itu, para pengelola barang belum memiliki kemampuan tentang tata cara penanganan barang hilang, penyusutan barang serta kode-kode dalam inventarisasi barang

Tidak hanya dalam pengkodean, penatausahaan juga berupa inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik negara, salah satu contoh berdasarkan surat temuan BPK, pada tahun 2014 BPK menemukan selisih inventaris pada

pencatatan di laporan BMN, berdasarkan latar belakang di atas tampak pentingnya prosedur inventarisasi agar bermanfaat, untuk pengamanan dan pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan instansi maka dari itu peneliti ingin meneliti dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan yang di terapkan dalam pengelolaan BMN yaitu PP No.27/2014, dengan permenkeu No. 120/PMK.06/2007 mengenai penatausahaan barang milik negara. Dengan judul **“PROSEDUR INVENTARISASI BMN PADA ASET TETAP” (STUDI KASUS: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT).**³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prosedur inventarisasi mengenai aset tetap pada BKKBN Pusat?
2. Kedala apa terjadi dalam proses pelaksanaan inventarisasi pada asset tetap di BKKBN Pusat?

C. Manfaat dan Tujuan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui:

³ *ibid.*

- a. Prosedur inventarisasi asset tetap dalam pengelolaan BMN, pada BKKBN pusat.
- b. hambatan yang terjadi dalam pengelolaan BMN pada BKKBN Pusat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat di Bidang Akademis
 - 1) Menambah pemahaman pengelolaan BMN atas penatausahaan serta penggolongan dan pengkodean pada instansi pemerintah di bidang Badan Kependudukan.
- b. Manfaat bagi Instansi/lembaga
 - 2) Sebagai bahan masukan kepada instansi/lembaga untuk peningkatan pengelolaan BMN pada masa yang akan datang telah sesuai